**POLITIK HUKUM PENGATURAN PENUNJUKAN DATUK ADAT DALAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT PESUKUAN LUHAK RAMBAH
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh : Yuli Hesman

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,LL.,M.
Pembimbing II: Zainul Akmal, S.H., M.H**

Alamat: Jl. Paus, Pekanbaru

Email : yuliyulihesman@gmail.com– Telepon: 082268482940

ABSTRACT

In the election of the traditional datuk in Luhak Rambah, there is an arrangement in the form of appointment. However, in this case, conflicts and controversies often occur between the children and nephews of tribal groups. Therefore, this research aims to find out the electoral system, traditional leadership structure in Luhak Rambah, and so on. This is what ideally happens in the Luhak Rambah community and this research can be used as a reference in making a policy. So, from this research, it was found that, in the legal system for the election of traditional datuks in the customary law community of the Luhak Rambah tribe, the election was carried out due to several factors.

The first was that the replacement of the dila was due to the condition of the traditional datuk (age and illness), so the election was carried out by means of deliberation and an appointment process. /appointed in accordance with the order of descent of the nephew's children. Second, the election is because the traditional datuk dies, so the election is carried out by determining which nephew's son will hold the body of the grandfather for the first time (cleaning the genitals), then that is the person who will be appointed to be the datuk next custom. From this research, ideas/mechanisms and more relevant regulations from the government are needed as guidelines and implementation rules to overcome problems that have occurred so that they do not happen again and can be carried out according to existing customs.

Keywords : Electoral System, Customs, Tribal People, Luhak Rambah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Rokan Hulu, memiliki beraneka ragam agama, suku dan adat istiadat. Diantara keaneka ragaman suku dan adat istiadat ialah terdapatnya 5 Luhak kelembagaan masyarakat adat yang ada di Rokan Hulu bekas peninggalan kerajaan- kerajaan terdahulu.

Rokan Hulu Memiliki 5 Luhak. Luhak- luhak tersebut merupakan bekas kerajaan di masa lalu dan di masa modern sekarang ini disebut dengan Negara. Lima Luhak tersebut ialah Luhak Rambah, Luhak Kepenuhan, Luhak Tambusai, Luhak Kunto Darussalam dan Luhak Rokan 4 Koto sebelum akhirnya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Masing-masing Luhak ini juga memiliki kerajaan antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan tak terpisahkan dan dilengkapi dengan alim ulama sebagai pembawa dan pengaruh agama dalam kehidupan, di sinilah muncul potatah-potitih "Tigo tungku sojorangan, tali bopilin tigo" itu lah pepatah yang harus di pegang teguh oleh pimpinan adat.

Diantara Lima Luhak tersebut, Luhak Rambah merupakan luhak yang memiliki 3 Komponen adat luar biasa, yang tidak dimiliki ditempat lain. Pertama, Suku Nan Tujuh, seperti Suku Melayu, Muniliang, Pungkuik, Kandang Kopuh, Ampu, Bonuo dan Kuti.. Kedua, Bangsawan (Rumah Pangka Balai, Rumah Atok Ijuk, Rumah Bugonjong, dan Rumah Belinggi). Dan Ketiga, Napituhuta (Sutan Nan Ompek Mangaraja Nan Tolu), 7 Kampung itu disebut dengan 7 Huta yang memiliki Raja masing- masi ng. "Seperti Kubu Baru, Sutan Nan Lobih, Kaiti Sutan Tuah, Menaming Sutan Kumalo Bulan, Tangun Sutan Silindung. Mangaraja Nan Tolu itu ada Mangaraja Timbalan Pawan, Mangaraja di sungai Tanjung Berani dan Mangaraja Sungai Pinang, itula h

beberapa nama kampong kerajaan yang ada di rokan hulu yang sangat menjun- ung tinggi akan adat-istiadatnya.¹

Dalam Luhak Rambah terdiri dari 4 wilayah, diantaranya kecamatan Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, dan Bangun Purba. Didalam luhak ini terdapat 2 sistem adat yaitu sistem pesukuan dan sistem bangsawan dan terdapat 7 pesukuan yaitu Suku Melayu,, Pungkuik, Kandang Kopuh, Ampu, Bonuo dan Kuti. Sistem pesukuan disini merupakan sistem dimana adat istiadat nya di jalankan oleh kaum pesukuan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan sebutan datuk dan pemimp in tertinggi di kenal dengan istilah pucuk yang sampai saat ini adat istiadat nya masih hidup.² Dalam pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu ini tentu harus ada nya suatu penekanan atau kebijakan dalam pelestarian adat istiadat yang ada di 5 Luhak tersebut. Maka butuh suatu politik hukum, dimana Politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara." Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.³

Selanjutnya, di Luhak Rambah dalam menjalankan peran dan tugas datuk adat dalam membimbing anak

¹ <https://rokanhulukab.go.id//pengurus-lka-luhak-rambah-resmi-dikukuhkan-komitmen-kapolres-rohul-masuk-suku-kuti-untuk-perbanyak-keluarga>. Di akses tanggal 29 Desember 2022.

² https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?new_detail&detailCatat=1789, di akses tanggal 9 Agustus 2023

³ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Cet.II,hal.160

kemenakan di dalam kaum pesukuan tentu sangat besar pengembanan amanahnya, dalam ungkapan adat mengatakan: “Kepemimpinan jangan di sia-siakan, Kekuasaan jangan disalah gunakan, Kebebasan jangan berlantangan ”. Ungkapan adat di atas menggambarkan bahwa setiap pemimpin dalam masyarakat Melayu mencerminkan, keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan seperti inilah yang diharapkan dalam masyarakat adat Melayu jika mau dihargai, dihormati dan disegani oleh masyarakat lain nya.⁴

Dalam sistem pemilihan datuk adat dalam masyarakat adat pesukuan Luhak Rambah ini yang didalam adat nya tentu juga harus memiliki prosedur pemilihan di dalam menentukan pemimpin adat (datuk) dimana prosedur tersebut ialah dengan ditunjuk sesuai dengan jenjang keturunannya dan tidak boleh dilanggar oleh anak kemenakan di dalam pesukuan dan diyakini akan mendatangkan kemudhorotan bagi kaum pesukuan karena peran dari tokoh adat tersebut sangatlah di butuhkan. Salah satu peran dari tokoh adat atau pemangku adat tersebut ialah Niniek Mamak. Niniek mamak adalah seseorang yang dituakan dari suatu kaum, juga sebagai pemimpin dalam suku. Niniek Mamak tersebut berperan sebagai pembimbing dan penengah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga pada anak-kemenakan dan dalam membantu meluruskan permasalahan yang di hadapi anak kemenakan kaum pesukuan.⁵

Selanjutnya, didalam kepemimpinan adat tersebut dalam pergantiannya terdapat beberapa unsur. Apabila Datuk adat telah tidak sanggup atau terjadinya hal-hal lain seperti penyakit atau umur yang sudah semakin

tua maka juga harus diganti dan dilakukannya pemilihan datuk. Dalam pemilihan tersebut tentu ada prosedur yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar oleh anak kemenakan kaum pesukuan yakni dengan ditunjuk sesuai dengan urutan jenjang keturunan.

Namun disamping itu didalam sistem pemilihan datuk adat tersebut juga sering terjadi konflik internal dimana ada anggota kaum pesukuan yang sangat berkeinginan menjadi datuk, sehingga jika tidak dilantik menjadi datuk maka akan bertengkar atau tidak tegur sapa bahkan mencaci dan mengancam serta memfitnah anggota kaum pesukuan yang lain, padahal cara yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan batuo (alur) didalam adat pesukuan nya dan tidak sesuai juga dengan urutan jenjang keturunannya, maka setelah ia dilantik menjadi datuk tidak lama kemudian menimbulkan penyakit (sakit-sakitan), seperti sesak nafas, bisu, tangan kaku, dan tidak adanya rasa ketentraman dan keharmonisan di dalam kaum pesukuan tersebut bahkan berakhir meninggal dunia.

Itulah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi didalam pemilihan datuk adat di Luhak Rambah. Jadi jika hal demikian terus di lakukan tanpa di benahi maka masyarakat hukum adat pesukuan luhak rambah tersebut akan terus menerus menerima kemudhorotan dan tidak adanya ketertiban dan keharmonisan di dalam masyarakat adat kaum pesukuan yang seharusnya mereka dapatkan. Maka agar tidak terjadi hal serupa dalam pemilihan datuk adat tersebut perlu adanya upaya tindakan berupa suatu pengaturan serta kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman dalam sistem pemilihan walaupun pemimpin adat tersebut tidaklah termasuk kedalam struktur pemerintahan namun diyakini dan kental akan pengaruhnya dalam masyarakat di kabupaten Rokan Hulu sehingga dengan

⁴ Juswadi, “ Pemimpin Yang Ideal Dalam Masyarakat Melayu”, JURNAL ILMU BUDAYA, Vol. 9 No 1 Tahun 2012

⁵ Wawancara Denagan Bapak Dasuki, Tokoh Adat Luhak Rambah (Kaur Desa Adat Muara Musu), Hari Minggu, 27 Agustus 2023, Di Rumah.

demikian bisa memperbaiki dan menyelesaikan masalah dalam pemilihan dan mentaati aturan adat sehingga prosedur pemilihan yang sudah ada tetap terjaga dan dilestarikan.⁶

Jadi jangan sampai melanggar peraturan-peraturan atau norma-norma sosial yang dapat melanggar pantang larang (langa sipak) sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat adat.⁷

Maka dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul tentang: **“POLITIK HUKUM PENGATURAN PENUNJUKAN DATUK ADAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT PESUKUAN LUHAK RAMBAH DI KABUPATEN ROKAN HULU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan ialah:

1. Bagaimana Sistem Pengaturan Penunjukan Pemilihan Datuk Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Pesukuan Luhak Rambah Di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana Gagasan Ideal Pengaturan Penunjukan Datuk Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Pesukuan Luhak Rambah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Sistem Pemilihan Datuk Dalam Masyarakat Hukum Adat Luhak Rambah.
- b. Untuk mengetahui Pengaturan Serta Aturan-

Aturan Yang dikeluarkan berdasarkan Prosedur Pemilihan Pimpinan Adat Luhak Rambah.

- c. Untuk mengetahui Tindakan Atau Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Dalam Pemilihan Datuk Adat Di Luhak Rambah Terhadap Perkembangan Sistem Pemilihan Di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan Hukum Adat didalam Masyarakat Hukum Adat Luhak Rambah.
- b. Menjadi bahan acuan serta perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Sistem Hukum Pemilihan Datuk Dalam Masyarakat Hukum Adat Luhak Rambah terhadap hukum positif di Indonesia.
- c. Sebagai Pedoman Bagi Masyarakat Adat Di dalam Menjalankan Kehidupan Sesuai Dengan Adat Kebiasaan Wilayah Luhak Rambah Khususnya Di Dalam Sistem Pemilihan Datuk Adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Masyarakat Hukum Adat

Menurut Ten Haar, mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak

⁶ Wawancara dengan bapak Taslim, Dan Jhon Kobet, Budayawan Luhak Rambah, Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, Bertempat Di Rumah Bapak Taslim

⁷ Juswadi, “ Pemimpin Yang Ideal Dalam Masyarakat Melayu”, JURNAL ILMU BUDAYA, Vol. 9 No 1 Tahun 2012

seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.⁸

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.⁹

Kemudian, pengertian Hukum Adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: "adatrecht". Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama yang memakai istilah "adatrecht" itu. Istilah "adatrecht" kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai tenhnis-juridis. Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa

ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat - masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Adat.¹⁰

Masyarakat adat memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu sebelum terbentuknya negara ini. Dasar susunan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat adalah berdasarkan ikatan genealogis dan ikatan teritorial.¹¹

Menurut Soediman Kartohadiprojo mengatakan hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran tertentu. Pembentukan hukum adat itu sendiri terbentuk dari tingkah laku manusia, norma-norma, dan kepercayaan secara turun-temurun yang dipercayai oleh masyarakat hukum adat sebagai hukum yang mengatur tingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari.¹²

2. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik. Pemilihan telah menjadi mekanisme yang biasa sejak

⁸ Gunawan Hadi Purwanto, SH. MH, Memahami Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, CV. Sarnu Untung, Jawa Tengah, 2015, hlm, 13

⁹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

¹⁰ Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hlm. 17

¹¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 tentang Naskah Rancangan UU Masyarakat adat pasal 1

¹² Abdurrahman, Hukum Adat Menurut Perundangan Undangan Republik Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1984, Hlm. 17

sistem perwakilan demokrasi modern beroperasi pada ke-17.¹³

Pemilihan Umum (Pemilu) pertama dilakukan pada tahun 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemaknaan terhadap pemilihan umum, terlebih dahulu harus memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*).²⁹ Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.¹⁴

Pemilihan umum memang menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepo menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.¹⁵

Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menjelaskan fungsi pemilihan umum ialah sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum

rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.

- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.¹⁶

3. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁷

Menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk

Menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁸ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan

¹³ <http://www.britannica.com/> "Election (political science)," Encyclopedia Britannica Online, diakses tanggal 14 Januari 2023

¹⁴ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 45

¹⁵ Bintang R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, hlm. 167.

¹⁶ Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum*, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia. Puslitbang politik dan kewilayahan PPW-LIPI, Jakarta, 1997, hlm. 6-10.

¹⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Cet.II,hal.160

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Cet.III hal. 352-353

hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada,
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan.
4. Untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.²⁰
2. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.²¹
3. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di

dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.²²

4. Sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut. Bilamana sesuatu itu adalah hukum maka sistem disini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut.²³
5. Hukum, pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.²⁴
6. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik.²⁵
7. Datuk adalah gelar adat yang diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan suatu kaum atau suku yang ada di nagari dan selanjutnya disetujui sampai di tingkat rapat adat oleh tokoh pemuka adat setempat.²⁶
8. Pesukuan adalah adat atau cara bersuku-suku (berkelompok menurut sukunya).
9. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup

¹⁹ *Ibid*

²⁰ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm 180

²¹ <https://lamongankab.go.id/beranda/bakesbang/post/9439#:~:text=Politik%20berasal%20dari%20bahasa%20Yunani,di%20dalam%20masyarakat%20itu%20sendiri.>

²² *Ibid*, hlm 161

²³ Nandang Alamsah Deliarnoor, Pengertian Sistem Hukum Indonesia, Universitas terbuka, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 3

²⁴ *Ibid*, hlm. 5

²⁵ <http://www.britannica.com/> "Election (political science)," Encyclopedia Britannica Online, diakses tanggal 14 januari 2023

²⁶ <https://tanah.datar.go.id/berita/3006/31-pemangku-adat-nagari-baringin-lima-kaum-dilewakan.html#:~:te xt=Datuk% 20merupakan% 20gelar% 20adat% 20di,lauk% 20dalam% 20ja muan% 20makan.di> akses tanggal 14 januari 2023

secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.²⁷

10. Luhak menurut adat adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan adat, dan dalam ketentuan itu hanya dapat dipahami dan dimengerti berdasarkan adat sedio lamo, dimana dia tak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas, sampai kapanpun sudah menjadi hukum tetap dan tak dapat diubah dalam bentuk apapun.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penelitian yang dilakukan ialah penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum.²⁹ Penelitian sosiologi adalah penelitian sosial yang objeknya adalah masyarakat. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi

²⁷ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf>, di akses tanggal 15 januari 2023

²⁸ Annisa Putri Islamiati, Frenky Imandra Putra Silalahi, Zainul akmal "Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan" JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 1/Februari 2021

²⁹ Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 311

dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).³⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di kelembaagaan masyarakat adat Luhak Rambah. Luhak Rambah memiliki 4 daerah kewilayahan yaitu kecamatan Rambah, Rambah Samo, Rambah hilir, dan Bangun Purba.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sebagai objek yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah Ketua LAM Rokan Hulu, para datuk adat atau pemangku suku, dan Tokoh Adat di Luhak Rambah yaitu di wilayah kecamatan Rambah, Rambah Hilir, dan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yang akan diteliti ialah, Ketua LAM kabupaten Rokan Hulu, Pucuk Suku atau Datuk adat dan Budayawan di Luhak Rambah tepatnya di kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu.

4. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Menurut Husein Umar data primer adalah: "Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti".³¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan anggota LAM, datuk-datuk pemangku

³⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

³¹ Nikolaus Duli, Metodologi Penelitian Kuantitatif "Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS", Deepublish, Jakarta, 2019, hlm 5

adat dan Pemerintah Adat Luhak Rambah serta Akademisi.

b. Data sekunder

Menurut Husein Umar adalah: “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram”.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kuesioner
- d. Kajian pustaka

6. Analisis Data

Data-data yang dihimpun dengan teknik studi lapangan, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Selain itu, data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dengan melakukan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum mengenai topik penelitian.³³

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia

1. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Pengaturan mengenai masyarakat adat Maka Berdasarkan uraian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa eksistensi masyarakat adat diakui keberadaannya hanya jika keberadaannya tersebut telah ditetapkan Perda yang mendasarkan diri pada kriteria sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) tersebut, dan hal yang paling fundamental itu semua adalah bahwa

pengakuan keberadaan masyarakat adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

2. Tinjauan Umum Tentang Desa Adat Di Indonesia

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Adapun Unsur-unsur dalam desa meliputi:

- a. Daerah (lingkungan geografis)
- b. Penduduk, yang meliputi berbagai hal tentang kependudukan seperti: jumlah, persebaran, mata pencaharian.
- c. Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Tentang Rokan Hulu

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kelurahan

³² *Ibid*, hlm 5

³³ *Ibid*

Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu .Kabupaten ini di kenal dengan julukan sebagai Negeri Seribu Suluk yang artinya menjalankan kedisiplinan dalam menjalankan aturan-aturan agama Islam, yang dikarenakan juga muncul dari banyaknya suluk atau masjid yang berdiri di kabupaten ini. Rokan hulu, mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan.Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis Rokan Hulu berbatasan Dengan daerah Kabupaten/Kota lain, seperti :

- a. Sebelah Utara : Padang Lawas dan Labuhan Batu
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Barat :Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat

2. Gambaran Umum Tentang Luhak Rambah

Sejarah masa lalu Luhak Rambah, Menurut T. Omar Krisna Adiwinata, ST Bin T. Rashmi Saleh, yang juga cucu Raja terakhir Rambah H. Tengku Saleh, saat ini banyak data dan fakta sejarah kerajaan Rambah itu yang diputar balikkan.“Ada beberapa data fakta sejarah Luhak Rambah, khususnya Kerajaan Rambah yang Kurang betul, baik disengaja ataupun tidak oleh pihak tertentu, sehingga perlu diluruskan Hal itu diketahui Omar, karena selaku Cucu Raja Rambah terakhir, Dia dan saudaranya masih memiliki dan menyimpan bukti otentik Dokumen Tarombo Raja Raja Rambah dan data lainnya menyangkut Luhak Luhak yang ada di daerah ini yang secara turun temurun dari nenek moyang, sehingga bisa dipertanggung jawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Penunjukan Datuk Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Pesukuan Luhak Rambah Di Kabupaten Rokan Hulu

Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”.

Di dalam masyarakat adat luhak rambah, luhak rambah yang memiliki 4 kewilayahan yaitu Rambah, Rambah Samo, Rambah Hilir Dan Bangun purba tersebut di dalam proses mengganti datuk adat nya sama. Pergantian seorang datuk adat diganti apabila terjadi 2 faktor, pertama, factor usia (sakit-sakitan), kedua factor meninggal dunia.

1. Faktor Usia (sakit-sakitan, dan lain nya)

Dalam proses nya dilakukan dengan musyawarah, hal merupakan suatu proses dalam memilih/menunjuk seorang datuk, proses pemilihan/musyawah ini dilakukan di rumah kaum perempuan, dimana dalam suatu pemilihan tentu nya ada prosedur yang harus di lakukan. Di Indonesia ini sistem hukum yang sering digunakan yaitu sistem hukum ini semua elemen masyarakat ikut serta di dalam nya. Namun berbeda hal nya dengan sistem hukum pemilihan datuk adat, di luhak Rambah dalam menunjuk atau mengganti datuk adat di Luhak Rambah ini hanya di ikuti oleh anak kemenakan di dalam kaum pesukuan saja dan dilakukan dengan musyawarah adat dan pengaturannya dilakukan dengan ditunjuk sesuai dengan jentang keturunan (poluo buah poruik) dan menurut ketentuan tunjuk ajar yang ada di adat pesukuan luhak rambah.³⁴ Sebagaimana

³⁴ Wawancara dengan bapak Taslim, Budayawan Luhak Rambah, Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, Bertempat Di Rumah Bapak Taslim

pepatah adat mengatakan lapuk-lapuk disayangi usang- usang di perbaharui artinya bahwa dalam adat itu baik datuk, pucuk, sukong ataupun tungkek dan sejenisnya tersebut ialah prosesnya dari niniek turun ke mamak dari mamak turun ke kemenakan hal ini disebut dengan alur (batuo), dan apabila telah kehilangan itu harus pula di cari cucuo aie galian tanah mencari botong tumbuh di mato (mencari solusi) itulah pepatah adat Luhak Rambah dalam Pengaturan pergantian serta penunjukan datuk adat dari dahulu.³⁵

2. Faktor Meninggal Dunia

Jadi didalam mengganti datuk adat, menurut dengan pengaturan yang telah ada sejak dahulu hal yang dilakukan adalah apabila datuk itu diganti karena meninggal dunia ,maka kaum pesukuan anak kemenakan memusyawarahkan nya terlebih dahulu siapakah diantara kaum pesukuan yang pertama sekali memegang jenazah dari sang datuk adat tersebut dalam bahasa adat nya di sebut dengan polu yang artinya membersihkan kemaluan nya dengan syarat memakai selendang putih di kepala dan sukong dari datuk adat tersebut sebagai sandaran dari jenazah tetapi hal demikian harus sesuai poluo buah poruik atau jenjang keturunan. Misalnya di dalam pesukuan seorang datuk memiliki 7 orang buah poruik laki2, maka diantara 7 tersebut di tunjuklah mana yg lebih tua dalam arti tua ibu nya dan tua pula anak nya di dalam suku tersebut jika memenuhi syarat kemudian jika tidak memenuhi syarat adat maka di tunjuk pula anak yg no 2 yg sesuai dengan syarat dan memiliki kesempatan atau luangan waktu untuk melakukan hal demekian.³⁶

Dari ke 7 orang buah poruik tersebut syarat yang harus di penuhi nya ialah:

1. Bisa memimpin doa (Paham Agama).
2. Paham Akan pepatah dan kebiasaan adat.
3. Apabila di hadapkan dengan mangkuk berabu (wadah yang berisikan bara api) bisa pula memimpin acara mulai dari pembacaan yasin, tahlil, serta doa sebagaimana pepatah adat (adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah).³⁷

a. Syarat-Syarat Menjadi Datuk Adat

Mempunyai syarat- syarat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan aluo buah porouik (jenjang garis keturunan)
2. Paham agama
3. Paham akan Petatah Petitih adat
4. Bisa dan mampu membimbing anak kemenakan didalam kaum pesukuan.³⁸

b. Larangan Bagi Seorang Datuk

(langa sipak)

Kemudian di dalam pengaturan pemilihan datuk adat di masyarakat adat luhak rambah tentunya juga harus memperhatikan pantang ataupun larangan untuk mejadi seorang datuk:

1. Langa sipak artinya meniru-niru tabi'at (kebiasaan tingkah laku) orang muda.
2. Mencileng arang di konieng (kening) artinya terbukti melakukan kesalahan menimbulkan bekas dimuka nya dan di ingat orang sampai tua. Contoh kesalahannya, seperti: mencuri, berkelahi masalah batasan tanah, dan sebagainya.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Wawancara Dengan bapak Zulyadaini (Ketua LAM Rokan hulu), Jhon Kobet dan Taslim, Budayawan Luhak Rambah, Bulan Agustus 2023, Di Rumah Masing-masing.

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Isul, Datuk Adat Suku Ampu Bergelarkan Sultan Mangkuto Alam, Hari Kamis, Tanggal 24Agustus 2023, Di Rumah.

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Makmur, Datuk Adat Suku Mais Mungilieng, Bergelarkan Lakno Monti, Hari Jum'at, Tanggal 25Agustus 2023, Di Rumah

3. Sunuk artinya patuh ke istri. Sunuk ini dilarang dalam adat karena jika patuh ke istri maka akan terbengkalai lah anak kemenakan nya.
4. Cakap Lompong-lompong artinya berbicara sesuka hati tanpa memikirkan sebab dan akibatnya.
5. Murocak Ntolak artinya segala sesuatu kepunyaan orang dia menganggap punya dia juga.³⁹

c. Hambatan Bagi Anak Kemenakan menjadi seorang datuk (Orang Yang Tidak Boleh dijadikan Datuk Adat)

1. Mulicak bonang arang itam tapak kaki artinya membuat kesalahan lama yang selalu diingat orang.
2. Tupanyik lansek masak artinya mengambil sesuatu dari anak kemenakan secara diam-diam.
3. Tumandi Puncuran Gadieng artinya jika pasangan datuk dan istrinya itu menikah sesuku maka datuk tidak bisa mendahulukan anaknya dikarenakan anaknya di bimbing oleh mamak dan datuk membimbing anak kemenakan nya.
4. Idok Menahun contohnya seperti penyakit gula penyakit yang dikhawatirkan kesembuhannya lama dan dikhawatirkan juga tidak bisa membimbing anak kemenakan nya.
5. Ilang Tidak Tau Rimba artinya berpindah tidak mengasih tau, padahal seorang datuk harus diketahui keberadaannya agar anak kemenakan mudah berurusan dengan nya.
6. Pernah Membayar Hutang Di rumah Gelap artinya kesalahan yang dibayar dirumah gelap (sudah pernah di penjara).⁴⁰

B. Bagaimana Gagasan Ideal Pengaturan Penunjukan Datuk Adat

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Zulyadaini, Ketua LAM Rokan Hulu, Bergelarkan Datuk Saudagar Rajo, Hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2023, Bertempat Di Komplek Perumnas Pemda Rokan Hulu.

⁴⁰ Wawancara Dengan bapak dan Taslim, Budayawan Luhak Rambah, Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, Di Rumah Bapak Taslim

Dalam Masyarakat Hukum Adat Pesukuan Luhak Rambah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

1. Perkembangan Terhadap Aturan-Aturan Adat Di Masyarakat Hukum Adat Luhak Rambah

Di dalam pengaturan pemilihan yaitu pengaturan tentang penunjukan datuk adat telah jelas dan sering dilakukan dari dahulu namun saat ini telah terjadi begitu banyak tata cara prosedur dalam pergantian datuk adat tersebut yang dirubah dan diikuti sertakan dengan berbagai macam unsur kepentingan. Kemudian di saat pemilihan atau penunjukan datuk adat ini dimana anak kemenakan yang belum bisa menjadi datuk namun tetap memaksakan diri, sehingga di dalam Luhak Rambah justru Hal ini tentu menimbulkan polemik dan dinamika-dinamika yang menciderai dan menghilangkan falsafah adat istiadat di Luhak Rambah dan juga menghilangkan aturan adat tentang pengaturan penunjukan datuk tersebut yang ada dan telah dari dahulu dilakukan dalam pemilihan tersebut.

Jadi, dengan demikian hal tersebut tidak relevan dengan kaedah dan falsafah adat istiadat Luhak Rambah yang dari dahulu selalu mengindahkan aturan dan kebiasaan adat yang ada dalam setiap kehidupan.⁴¹ Maka dibutuhkan lah Politik hukum untuk mengatur pengaturan tersebut.

2. Gagasan Ideal Pengaturan Penunjukan Datuk Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Pesukuan Luhak Rambah

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu, sehingga menurut beberapa pemangku-pemangku adat dan masyarakat dalam pengaturan pemilihan datuk adat ini harus dibuat aturan tata pelaksanaannya dalam bentuk tertulis

⁴¹ Wawancara dengan bapak Taslim Dan Jhon Kobet, Budayawan Luhak Rambah, Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, Bertempat Di Rumah Masing-Masing

berupa kebijakan pemerintah yaitu perda dan lainnya, sehingga aturan serta kebijakan yang dibuat bisa di jadikan pedoman dalam pemilihan datuk adat walaupun hukum adat tersebut ialah hukum yang tidak tertulis, namun karena Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan suatu kabupaten yang masih kental dan mengandalkan kebiasaan adat istiadat terdahulu, maka dalam hal pelaksanaan pemilihan datuk adat tersebut juga harus di atur pengaturannya. Sehingga dengan adanya pedoman berupa aturan perda yang dibuat tersebut masyarakat hukum adat Luhak Rambah dari waktu ke waktu bisa lebih efektif lagi dalam pelaksanaan pergantian dan penunjukan datuk adat pesukuan mereka dan tidak ada lagi permasalahan yang sama terjadi di masa yang akan datang serta masyarakat juga bisa mengerti dan mengikuti tentang tatanan adat istiadat yang dari dulu sudah ada.

Adapun hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antaranya :

1. Mengembangkan Pendidikan Karakter
2. Meningkatkan Kegiatan Budaya
3. Membuat Perputakaan Adat
4. Mengadakan Festival/Acara-Acara Adat
5. Membuat/Menerbitkan Buku-buku Adat

Jadi dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan-kegiatan adat tersebut pemerintah bisa menimbang dan memutuskan serta menentukan arah kebijakan yang akan di buat. Maka dari hal demikian muncul lah beberapa gagasan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan terhadap sistem pemilihan datuk adat tersebut, antara lain :

1. Dalam pembuatan peraturan tersebut pemerintah diharapkan mengikuti atau turun langsung terlebih dahulu di dalam adat istiadat yakni dalam bentuk pengawasan dengan tujuan untuk suatu pengamatan dan pertimbangan.

2. Melakukan kegiatan dalam konteks adat istiadat. Sehingga dengan adanya kegiatan adat maka pemerintah bisa lebih efektif dalam penentuan dan pembuatan peraturan.
3. Pemerintah harus melibatkan masyarakat adat khususnya pemangku- pemangku adat di Luhak Rambah yakni di dalam penentuan syarat dan kriteria dan kualifikasi serta konskuensi yang jelas untuk menjadi datuk adat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik Hukum Pengaturan Penunjukan Datuk Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Luhak Rambah

Adapun di dalam pengaturan penunjukan datuk adat di Luhak Rambah Kabupaten Rokan Hulu dalam penggantian datuk adatnya sistem pemilihan dilakukan karena 2 faktor. Pertama faktor umur atau sakit-sakitan, Kedua Faktor meninggal dunia. Dalam sistem pengaturan pemilihan datuk adat di lakukan dengan penunjukan. Penunjukan datuk adat di lakukan dalam suatu pesukuan yang hanya di ikuti oleh satu pesukuan itu saja dengan syarat anak kemenakan yang ditunjuk harus sesuai dengan jenjang keturunannya (poluo buah poruik) dalam arti tua ibunya dan tua pula anaknya berdasarkan asas Sonik Bugilie, Godang Bulega. Kemudian anak kemenakan yang ditunjuk harus paham agama dan petatah petitih adat. Kemudian dalam hal meninggal dunia Maka orang yang pertama sekali memegang jenazah dari sang datuk adat tersebut yakni dalam hal membersihkan polu (kemaluan) dengan syarat memakai selendang putih dikepala dan seterusnya, maka kemudian anak kemenakan itulah yang akan di angkat menjadi datuk seterusnya.

2. Gagasan Ideal Pengaturan Penunjukan Datuk Adat Dalam

Masyarakat Hukum Adat Pesukuan Luhak Rambah

Bahwasanya dalam pemerintahan Rokan Hulu khususnya Luhak Rambah ini banyak sekali aturan atau kebijakan yang dikeluarkan. Namun kebijakan tersebut tidaklah ada aturan tentang pelaksanaan pemilihan pimpinan adat, padahal didalam menentukan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah berawal dari keharmonisan masyarakat adat dengan kepemimpinan adat. Maka dari hal demikian tentu sangat dibutuhkan aturan dan kebijakan yang seharusnya dibuat pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam pelaksanaan pengaturan penunjukan datuk adat tersebut. Aturan-aturan tersebut dalam bentuk tertulis berupa kebijakan pemerintah yaitu perda dan lainnya, sehingga aturan serta kebijakan yang dibuat bisa di jadikan pedoman dalam pemilihan datuk adat walaupun hukum adat tersebut ialah hukum yang tidak tertulis, namun karena Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan suatu kabupaten yang masih kental dan mengandalkan kebiasaan adat istiadat terdahulu, maka dalam hal pelaksanaan pemilihan datuk adat tersebut juga harus di atur pengaturannya. Sehingga dengan adanya pedoman berupa aturan perda yang dibuat tersebut masyarakat hukum adat Luhak Rambah dari waktu ke waktu bisa lebih efektif lagi dalam pelaksanaan pergantian dan penunjukan datuk adat pesukuan mereka.

B. Saran

Bahwasanya sistem pemilihan datuk adat luhak rambah dahulu dilakukan dengan musyawarah adat dan pemilihannya dilakukan dengan ditunjuk sesuai dengan jentang keturunan (polu buah poruik). Sehingga agar sistem pemilihan datuk ini berjalan dengan efektif dan relevan maka di butuhkan nya suatu aturan secara tertulis yang dibuat oleh LAM Rokan Hulu dan Pemerintah yang berisikan tata cara pemilihan dan

sanksi-sanksi adat mengenai sistem pemilihan datuk adat baik itu dalam bentuk buku ataupun lainnya dengan tujuan agar permasalahan pemilihan yang telah terjadi dahulu kedepannya tidak terulang lagi dan bisa dilakukan sesuai tunjuk ajar yang telah ada sejak dahulu.

1. Di masyarakat adat luhak rambah, sistem pemilihan datuk adat ini sudah banyak di lupakan bahkan di ikut campur aduk kan dengan sistem demokrasi zaman sekarang, jadi seharusnya hal-hal yang dilakukan pertama sekali ialah peranan pemerintah yang lebih, bertujuan untuk penguatan aturan baik aturan adat ataupun aturan pemerintah dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan agar generasi masyarakat adat di luhak rambah ini tidak melupakan adat istiadat yang telah. Disamping itu juga di butuhkan pedoman, buku-buku ajar dan lainnya mengenai adat kebiasaan luhak rambah, dengan tujuan agar sistem pemilihan pimpinan adat di Luhak Rambah Rokan Hulu berjalan sebagaimana mestinya sehingga adat diluhak rambah tetap terjaga dan tidak hilang mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, 1986, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Hadi Purwanto, 2015, Memahami Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, CV. Sarnu Untung, Jawa Tengah.
- Surojo Wignjodipuro, 1995, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung agung, Jakarta.
- Abdurrahman, 1984, Hukum Adat Menurut Perundangan

- Undang-undang Republik Indonesia, Cendana Press, Jakarta.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
- Bintar R. Siragih, 1998 Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Syamsuddin Haris, 1997, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia. Puslitbang politik dan kewilayahan PPW-LIPI, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, Utrecht, 1957, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta
- Nikolaus Duli, 2019, Metodologi Penelitian, Kuantitatif, “Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS”, Deepublis, Jakarta.
- B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi**
- Juswadi, “Pemimpin Yang Ideal Dalam Masyarakat Melayu”, JURNAL ILMU BUDAYA, Vol. 9 No 1 Tahun 2012
- Annisa Putri Islamiati, Frenky Imandra Putra Silalahi, Zainul akmal “Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan ” JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan) Volume 17 Nomor 1/Februari 2021
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
- Naskah Akademik Rancangan UU Masyarakat adat.
- D. Website**
- <https://rokanhulukab.go.id//pengurus-lka-luhak-rambah-resmi-dikukuhkan-komitmen-kapolres-rohul-masuk-suku-kuti-untuk-perbanyak-keluarga>. Di akses tanggal 29 Desember 2022.
- https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?new_detail&detailCatat=1789, di akses tanggal 9
- <https://tanah.datar.go.id/berita/3006/31-pemangku-adat-nagari-baringin-lima-kaum-xt=Datuk>
- E. Wawancara**
- Wawancara Dengan Bapak Zulyadain Dan Bapak Dasuki, Bulan Agustus 2023, Di Rumah.
- Wawancara dengan bapak Taslim, Dan Jhon Kobet, Budayawan Luhak Rambah, Bulan Agustus 2023, Bertempat Di Rumah.